



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2020

Toward Accountability and Service Excellence



towards accountability and service excellence

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Kami menyadari di dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini dapat menjadikan acuan kerja kami selama 1 tahun ke depan, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Sidoarjo,

2019

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HELMY PERDANA PUTERA, Drs., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630325 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.3. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. LANDASAN HUKUM.....	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.1. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA.....	9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR.....	20
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR.....	26
2.1. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TIMUR.....	29
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	38
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	38
3.2. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT.....	38
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR.....	47
4.1. PRIORITAS INSPEKTORAT YANG MENDUKUNG PRIORITAS PROVINSI.....	47
4.2. PRIORITAS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR.....	48
4.3. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020.....	50
BAB V PENUTUP.....	52
5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN.....	52
5.2. RENCANA TINDAK LANJUT.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019.	10
Tabel 2. 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	25
Tabel 2. 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	30
 Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.....	 39
Tabel 3. 2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	41
 Tabel 4. 1. Prioritas Inspektorat Provinsi Jawa Timur	 49
Tabel 4. 2. Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.....	51



1.3. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan perencanaan jangka pendek satu tahun (RKPD). Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 050/ 5774/201.5/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan perencanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Renja perangkat Daerah merupakan penjabaran program dan kegiatan serta anggaran yang lebih detail dari rencana strategis 5 tahunan yang telah disusun oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Renja disusun sebagai pedoman kerja selama 1 tahun. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat mendukung visi Gubernur terpilih yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan”** dengan Misi **“Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris.”**

Dalam kerangka organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Inspektorat memiliki peranan dan fungsi yang cukup strategis dalam menjaga dan mengawal akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab atas pengelolaansumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus tetap dikawal dan dijaga untuk mewujudkan *good governance* menuju *clean government* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Timur dalam mewujudkan Jawa Timur yang lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2.LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2019 Jawa Timur Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.
15. SK Inspektur Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/...../201/2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun, yang didasarkan atas capaian/ realisasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 serta proyeksi capaian hingga triwulan I tahun anggaran 2019 yang disesuaikan dengan perubahan kondisi kemampuan sumber daya manusia, kemampuan anggaran serta kondisi lainnya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan anggaran Tahun 2020;
2. Sebagai dasar untuk menentukan target capaian Tahun 2020;
3. Sebagai dasar untuk menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2020;
4. Sebagai pedoman arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan pada Tahun 2020.

1.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2020 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Bab ini berisi penjabaran mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2018, prakiraan capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2019 (periode Januari s.d. Maret 2019), dan capaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur, maka disusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Inspektorat, yang diharapkan akan mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjabaran mengenai prioritas Inspektorat yang mendukung prioritas provinsi, prioritas Inspektorat terkait dengan tugas fungsi reguler, serta program dan kegiatan di tahun 2020.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018



2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 merupakan target tahun ke-5 dari Periode Renstra tahun 2019-2024. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2018 serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2019-2024 dilakukan sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

Terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, walaupun masih terdapat beberapa program/kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak 100%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2019 (periode Januari s.d. Maret 2019) diperkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatan akan sesuai dengan target Rencana Kerja Tahun 2019.

Evaluasi capaian atas pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2018 dan prakiraan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019.

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3				FUNGSI PENUNJANG URUSAN									
3	0 5			PENGAWASAN									
3	0 5	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100	100	100	100	100	100	100	100
3	0 5	01	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	persentase pegawai yangpuas terhadap pelayanan perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100
3	0 5	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	0	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	75	75	75	75	75	75	75	75
3	0	02	31	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	75	75	75	75	75	75	75	75
3	0	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100	100	100	100	100	100	100	100
3	0	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi								
3	0	07	001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	pelaksanaan konsultasi ke kementerian	100		6 kali	6 kali	100	100	100	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	0	07	002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal	100	100	100	100	100	100	100	100
					jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	100	100	100	100	100	100	100	100
3	0	08		Program penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
3	0	08	001	penyusunan dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	11 dokumen	4 dokumen	2 dokum en	2 dok	100	2	7	63.6
3	0	08	002	penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	20 dokumen	8 dokumen	4 dokum en	4 dok	100	4	16	80.0

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	0	08	003	penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data	jumlah update database perangkat daerah	5 database	2 database	1 databa se	1 database	100	1 database	3 database	60
3	0	08	004	penyusunan laporan pengelolaan keuangan	jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	2 laporan		1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	50
3	0	20		Program peningkatan SPI dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan	75	75	75	50	66.7	75	75	93.75
		20	007	Sinkronisasi pengawasan pusat dan daerah	Dokumen Kebijakan Pengawasan	2 dok	2 dok						
3	0	20	008	evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	jumlah dok hasil evaluasi	80	70	75	50	66.7	75	70	87.5

Kode				Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	05	20	012	koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	jumlah peraturan kebijakan pengawasan	10 dokumen	4	2 dokum en	2 doku men	100	2 dok	8dok	80
3	05	21		Program peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	aparatur pengawasan yang mengikuti diklat/ PKS	70	60	60	60	100	70	70	100
3	05	21	001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	70	60	60	60	100	70	70	100
3	05	22		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparatur pengawasan	10 buah	4	2 buah	2 buah	100	10 buah	8	80

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	0	22	002	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparatur pengawasan	10 buah	4	6 buah	6	100	10 buah	8	80
3	0	79		Program Pencegahan Korupsi	penilaian WBK dan WBBM	10 PD	3 OPD	2 PD	2 PD	100	2 PD	5 PD	50
3	0	79	001	Kegiatan Pencegahan dan pemberantasan korupsi	jumlah perangkat daerah dengan status zona integritas bebas korupsi	6	5.8	5.9	5.9	100	6	6	100
3	0	92		Program peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	prosentase kerugian daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100	100
3	0	92	001	Pemeriksaan Reguler SKPD/UPT	Jumlah Obrik dengan status WTP dari BPK terhadap pengelolaan	610 obyek	135 dokumen	125 obyek	153 obyek	122.4 0	125 obyek	125 obyek	100

Kode				Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					keuangan daerah								
				Monev Program Unggulan Pemprov Jatim	Obyek Pemeriksaan	150 obyek	38 kab/kota						
3	0 5	92	002	Identifikasi Pra Pemeriksaan Reguler	Obyek Pemeriksaan	150 obyek	38 kab/kota	30 obyek	101 obyek	337	30 obyek	30 obyek	100
3	0 5	92	003	Pemeriksaan Tujuan Tertentu	Jumlah pemeriksaan yang dilaksanakan	125 obyek	5 laporan	25 obyek	6 obyek	24	25 obyek	25 obyek	100
3	0 5	92	004	Pemeriksaan Khusus	Jumlah pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan	175 obyek	5 laporan	35 obyek	4 obyek	11	35 obyek	35 obyek	100
3	0 5	92	005	Pemeriksaan Kasus	jumlah pemeriksaan kasus yang dilaksanakan	125 obyek	7 laporan	25 obyek	10 obyek	40	25 obyek	25 obyek	100
3	0 5	92	006	Review Laporan Keuangan	jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan review laporan keuangan	5 dokumen	3 Laporan	1 dokum en	1 doku men	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2019- 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	0	92	007	Evaluasi LPPD	jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi LPPD	38 Kab/Kota	38 Kab/Kota	38 Kab/Kota	38 Kab/Kota	100	38 Kab/Kota	38 Kab/Kota	100
3	0	92	008	Evaluasi LAKIP	jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	12 SKPD	65	2 SKPD	45 SKPD	2,250	2 SKPD	2 SKPD	100
3	0	92	009	Telaah Sejawat Hasil Pengawasan	jumlah pelaksanaan review LHP	120 Kali	10	24 Kali	60 Kali	250	24 Kali	24 Kali	100

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari 12 program yang dilaksanakan pada tahun 2018, terdapat 3 program yang target kinerjanya tidak tercapai. Target kinerja program yang tidak tercapai, meliputi:

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- b. Program peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- c. Program Pencegahan Korupsi.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program:

- a. Perangkat Daerah tidak seluruhnya menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Kasus yang masuk ke Inspektorat tidak selalu sama setiap tahun;
- c. Penilaian WBK dan WBBM sudah diajukan 2 OPD untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, namun setelah dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.

2. Dari 23 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, terdapat 4 kegiatan yang target kinerjanya yang tidak tercapai. Target kinerja kegiatan yang tidak tercapai, meliputi:

- a. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
- b. Kegiatan Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. Pemeriksaan Tujuan Tertentu;
- d. Pemeriksaan Khusus;
- e. Pemeriksaan Kasus.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan adalah:

- a. Kegiatan lain tidak mencapai target adalah merupakan kegiatan lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi, dikarenakan terdapat perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terkait penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK);
- b. Perangkat Daerah tidak seluruhnya menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- c. Kasus yang masuk ke Inspektorat tidak selalu sama setiap tahun;

- d. Penilaian WBK dan WBBM sudah diajukan 2 OPD untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, namun setelah dilakukan assessment oleh pusat, ternyata masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja pelaksanaan program/ kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah melakukan perubahan Rencana Strategis tahun 2019-2024 mengacu pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan tujuan target kinerja Renstra pada akhir periode rencana dapat tercapai. Perubahan Renstra dimaksud meliputi :

1. Terhadap indikator program yang tidak tercapai akan ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Penyesuaian nomenklatur program/ kegiatan serta indikator dan target kinerja menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai akibat :
 - a. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; dan,
 - b. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terkait penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

- perencanaan program pengawasan;
- perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugasnya dibagi menjadi 4 (empat) *leading sector* yaitu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, Bidang Ekonomi Pembangunan, Bidang Pemerintahan, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat serta didukung oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Sub Bagian Tata Usaha serta Sub Bagian Keuangan.

Dalam meningkatkan pembinaan pada Tahun 2018 dan 2019 melalui Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; serta Program Pencegahan Korupsi, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan:

1. Pendampingan yang dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap Pengelolaan Keuangan dan Belanja pada perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur;
2. Sekretariat Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai *supporting system*, turut berperan dengan melaksanakan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah yaitu dengan :
 - Evaluasi pertanggungjawaban pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana Tim Evaluasi SPJ melaksanakan evaluasi kesesuaian serta kelengkapan SPJ dengan peraturan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur.

- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menggambarkan kesesuaian antara anggaran pengawasan di Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja pengawasan.
 - Monitoring, evaluasi dan verifikasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Tim evaluasi RAD-PPK melaksanakan evaluasi terhadap kesiapan data yang akan dilaporkan/di-*upload* pada laman Serambi Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah dan selanjutnya melaporkan hasilnya pada setiap triwulan kepada Gubernur Jawa Timur serta mengidentifikasi kendala dalam memenuhi data dukung yang dibutuhkan.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Internal/Eksternal, BPKP RI dan BPK RI, yaitu Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan Desk/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, BPKP dan BPK RI pada perangkat daerah terperiksa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk penyelesaian tindak lanjutnya hingga mendapatkan status Tuntas.
 - Monitoring dan evaluasi di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur terkait pembentukan dan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Monitoring dan evaluasi di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur terkait pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan penyusunan kegiatan saber pungli sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
3. Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan

kinerja Pemerintah pada 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang diukur dengan persentase Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh kategori \geq Tinggi dan Persentase Penurunan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori Rendah;

4. Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretariat Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi PPG Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) untuk penyusunan konsep kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta memfasilitasi penerusan pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
5. Sebagai tindak lanjut terhadap Evaluasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Tim Daerah Evaluasi Pelayanan Publik, dimana Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai Sekretaris Tim Daerah, melalui penilaian dan penetapan yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Provinsi Jawa Timur. Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM diawali pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur khususnya pada UPT Jembatan Timbang di seluruh Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu (P2T) pada tahun 2012. Selanjutnya, pada tahun 2013, dilakukan perluasan pencanangan pada RSUD Dr. Soedono di Madiun, RS Kusta Sumberglagah Mojokerto, dan Perekrutan CPNS 2013 oleh BKD. Kemudian, pada tahun 2015 kembali dicanangkan 4 Unit Kerja pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yaitu RSU Haji Surabaya, RS Paru Jember (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur), UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember (UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan), dan UPT Pengawasan dan

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Surabaya (UPT Dinas Pertanian).

Sebagai tindak lanjut pencanangan pada 9 perangkat daerah/ Unit Kerja, maka pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap 2 unit kerja yaitu UPT P2T dan RSUD Dr. Soedono Madiun dan hasilnya telah diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI guna dinilai oleh Tim Penilai Nasional yang selanjutnya bisa ditetapkan menjadi WBK.

6. Inspektorat Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur melakukan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan ke Desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Desa (BKD), Dana Desa (DD), dan hibah-bansos, dengan membuka ruang konsultasi bagi perangkat desa yang diberi nama “KADES LAWAS” yang merupakan akronim dari KAWAL DESA MELALUI PENGAWASAN. Klinik ini merupakan inisiatif dan inovasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan organisasi perangkat daerah Kabupaten untuk bersama-sama memberikan solusi terhadap segala permasalahan terkait pengelolaan bantuan keuangan di Desa yang selama ini dianggap menjadi masalah oleh perangkat desa.

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yaitu:

Sasaran 1:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Indikator sasaran 1:

[1] Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran 2:

Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui pendekatan SPIP

Indikator sasaran 2:

[1] Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP

Sasaran 3:

Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah

Indikator sasaran 3:

Persentase perangkat daerah yang dilakukan klinik konsultasi

Adapun pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Rata-rata nilai maturitas SPIP pada OPD diperiksa			0	76,3	76,3	76,4	0		76,3	76,4	
1	Persentase Kerugian Daerah			50	50	50	50	50		50	50	
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi			100	100	100	100	100	100	100	100	
II	Level Kapabilitas APIP			2	3	3	3	2	3	3	3	
1	Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS			100	100	100	100	100	100	100	100	
III	Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2			0	81	81	82	81	82	81	82	
1.	Persentase indikator program yang tercapai			76	77	77	79	76	77	77	79	
2.	Pelaksanaan Reviu			18	18	18		18	18	18	18	
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			76	76	76	77	76	50	76	77	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Eskalasi peningkatan tuntutan akan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja semakin meningkat sejak diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010. Meskipun sempat mengalami penurunan opini terhadap Laporan Keuangan tahun 2014 menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP), Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali dapat meraih opini WTP untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 2016, dan 2017. Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebagai *Quality Assurance*, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengawal kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tetap menjalankan semangat transparansi dan akuntabilitas kinerja, serta dituntut untuk mampu membawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuju pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel di bawah motto ***Towards Accountability and Service Excellence*** yaitu dengan :

- Asistensi : Memberikan asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka audit oleh BPK RI, dan melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada perangkat daerah, Reviu RPJMD, RKPD, RKA, Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa;
- Sosialisasi : Melakukan sosialisasi atas hasil-hasil pengawasan dan ketentuan-ketentuan terkait pembinaan dan pengawasan serta Program Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi kepada perangkat daerah;
- Konsultasi : Memberikan layanan bimbingan teknis kepada perangkat daerah terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan layanan konsultasi kepada perangkat daerah terkait Evaluasi SPJ, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, serta layanan konsultasi dan bimbingan kepada Kabupaten/ Kota terkait Evaluasi RAD PPK, Bantuan Keuangan di desa, dan lain-lain.

1. Maturitas SPIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. PP 60/2008 ini diharapkan berperan dalam tiga hal: sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP, landasan penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan SPIP. Penyusunan Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah memenuhi tahap-tahap proses governance dalam menyelenggarakan SPIP. Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP telah dicanangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM), maka kewajiban pemerintah pula menyediakan suatu mekanisme untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

2. Survey integritas dari KPK dan BPS

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendorong kesadaran akan risiko korupsi. Survei ini dilakukan dengan cara memetakan risiko korupsi seperti suap/ gratifikasi dalam layanan, penggelembungan anggaran, nepotisme dan suap dalam perekrutan pegawai, jual-beli jabatan hingga rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk melihat efektivitas sosialisasi mengenai korupsi, *whistleblower system* dan upaya anti korupsi lainnya.

Survei Penilaian Integritas ini menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakuan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut. Koresponden dalam survei ini meliputi pegawai (internal), pengguna layanan atau *stakeholder*(eksternal), ahli di bidang korupsi dan juga melihat hasil kepatuhan LHKPN dari lembaga tersebut atau laporan pengaduan masyarakat kepada KPK. Tahun 2018, SPI dilakukan terhadap 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi. Untuk tahun 2019, KPK menargetkan agar SPI dapat dilakukan di 84 Kementerian/Lembaga dan seluruh Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota. Survei ini bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif dari seluruh lembaga tersebut sangat diharapkan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas ini.

3. Kawal Desa

Tahun 2016, Satgas Dana Desa berhasil mengumpulkan dugaan 932 aduan kasus pelanggaran, karena berhubungan dengan penyelenggaraan negara, 200 kasus diserahkan ke KPK dan 167 diserahkan ke kepolisian. Sedangkan sisanya hanya soal kesalahan administratif. Dari total tersebut, yang masuk ke meja hijau 67 kasus. Sampai April 2018, terdapat 1.371 pengaduan kasus pelanggaran Dana Desa yang disampaikan oleh Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Ansar Husen Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendes PDTT Ansar Husen pada Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa. digelar di Hotel The Rinra Makassar, Kamis (29/11/2018).

4. Saber Pungli

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum, maka sejak Oktober 2016 hingga Oktober 2018 berhasil

melakukan 8.424 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan bersama dengan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), UPP Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), UPP Provinsi dan kabupaten/kota dan dari data tersebut, kasus yang diserahkan Aparat Penegak Hukum (APH) kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah berjumlah 256 dari jumlah total 8.424 kasus. Namun sampai saat ini, belum ada laporan tindak lanjutnya, baik ke UPP Provinsi maupun Satgas Saber Pungli pusat, sebagaimana penjelasan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Saber Pungli, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dalam Rakernas Satgas Saber Pungli 2018 di Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 12/12/2018.

2.1. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

No				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng		
				Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
(1)				(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
3	5	1	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Jaw a Timu r	Persentase Kerugian Daerah	50	perse n	16.400.545.00 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	Jaw a Timu r	Persentase Kerugian Daerah	50	perse n	16.400.545.00 0	
			00 1	Pengawasan Reguler PD/UPT	Jaw a Timu r	Obyek Pemeriksaan	90	obyek	8.201.250.000 ,00	Pengawasan Reguler PD/UPT	Jaw a Timu r	Obyek Pemeriksaan	90	obyek	8.201.250.000 ,00	
			00 2	Monev Pertanggungjaw aban Pengelolaan Keuangan	Jaw a Timu r	Obyek Pemeriksaan	60	obyek	3.465.500.000	Monev Pertanggungjaw aban Pengelolaan Keuangan	Jaw a Timu r	Obyek Pemeriksaan	60	obyek	3.465.500.000	
			00 3	pemeriksaan tujuan tertentu/ Kasus/ Khusus	Jaw a Timu r	Obyek Pemeriksaan	45	obyek	1.593.220.000	pemeriksaan tujuan tertentu/ Kasus/ Khusus	Jaw a Timu r	Obyek Pemeriksaan	45	obyek	1.593.220.000	
			00 4	Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa	Jaw a Timu r	Jumlah Kab yang dilakukan klinik konsultasi	12	kab	1.891.700.000	Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa	Jaw a Timu r	Jumlah Kab yang dilakukan klinik konsultasi	12	kab	1.891.700.000	
			00 5	Klinik Konsultasi pada Perangkat Daerah	Jaw a Timu r	Jumlah PD yang dilakukan klinik konsultasi	20	PD	128.000.000	Klinik Konsultasi pada Perangkat Daerah	Jaw a Timu r	Jumlah PD yang dilakukan klinik konsultasi	20	PD	128.000.000	

No				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng		
				Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			007	Evaluasi LPPD	Jawa Timur	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	38	Kab/ Kota	980.525.000	Evaluasi LPPD	Jawa Timur	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	38	Kab/ Kota	980.525.000	
			008	evaluasi LAKIP	Jawa Timur	Jumlah PD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A	45	PD	140.350.000	evaluasi LAKIP	Jawa Timur	Jumlah PD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A	45	PD	140.350.000	
3	05	79		Program Pencegahan Korupsi	Jawa Timur	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi	100	perse n	3.694.375.000	Program Pencegahan Korupsi	Jawa Timur	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi	100	perse n	3.694.375.000	
3	05	79	001	Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta	Jawa Timur	Rapat Kerja Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	4	kali	126.500.000	Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta	Jawa Timur	Rapat Kerja Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	4	kali	126.500.000	

No				Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catat an Penti ng
				Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			00 2	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jaw a Timu r	Pencananga n pada PD/ satker	2	entita s	43.105.000	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jaw a Timu r	Pencananga n pada PD/ satker	2	entita s	43.105.000	
			00 3	Kerja Sama APIP-APH	Jaw a Timu r	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	2	kali	1.275.750.000	Kerja Sama APIP-APH	Jaw a Timu r	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	2	kali	1.275.750.000	
					Jaw a Timu r	Rapat kerja pembahasan kasus/ pengaduan masyarakat	4	kali			Jaw a Timu r	Rapat kerja pembahasan kasus/ pengaduan masyarakat	4	kali		
			00 4	Peringatan Hari Anti Korupsi	Jaw a Timu r	Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi	1	kali	257.950.000	Peringatan Hari Anti Korupsi	Jaw a Timu r	Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi	1	kali	257.950.000	
			00 5	Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jaw a Timu r	Jumlah evaluasi	4	kali	1.278.350.000	Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jaw a Timu r	Jumlah evaluasi	4	kali	1.278.350.000	
			00 6	Survei Penilaian Integritas	Jaw a Timu r	Perangkat daerah yang disurvei	6	PD	123.150.000	Survei Penilaian Integritas	Jaw a Timu r	Perangkat daerah yang disurvei	6	PD	123.150.000	
			00 7	Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi	Jaw a Timu r	Pelaksanaan monev rencana aksi pada perangkat daerah	8	PD	539.070.000	Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi	Jaw a Timu r	Pelaksanaan monev rencana aksi pada perangkat daerah	8	PD	539.070.000	

No				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
				Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
					Jawa Timur	Pelaksanaan monev rencana aksi pada Kabupaten/ Kota	12 kab/kota			Jawa Timur	Pelaksanaan monev rencana aksi pada Kabupaten/ Kota	12 kab/kota		
			008	Audit Berkala SNI ISO 37001:2016	Jawa Timur	Jumlah audit internal dan eksternal	2 kali	50.500.000	Audit Berkala SNI ISO 37001:2016	Jawa Timur	Jumlah audit internal dan eksternal	2 kali	50.500.000	
3	5	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jawa Timur	Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS	100 persen	986.820.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jawa Timur	Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS	100 persen	986.820.000	
		21	001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jawa Timur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal	100 pegawai	986.820.000	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jawa Timur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal	100 pegawai	986.820.000	
3	05	01		Program Pelayanan Kesekretariatan	Jawa Timur	Persentase indikator program yang tercapai	77 %	7.047.965.000,00	Program Pelayanan Kesekretariatan	Jawa Timur	Persentase indikator program yang tercapai	77 %	7.047.965.000,00	
					Jawa Timur	Persentase realisasi anggaran	90 %			Jawa Timur	Persentase realisasi anggaran	90 %		

No				Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
				Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
					Jaw a Timu r	Indeks preofesionalit as ASN	77	%			Jaw a Timu r	b	77	%		
			00 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jaw a Timu r	Jumlah dokumen	6	dok	67.380.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jaw a Timu r	Jumlah dokumen	6	dok	67.380.000,00	
			00 2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jaw a Timu r	Jumlah laporan	14	lap	5.600.000,00	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jaw a Timu r	Jumlah laporan	14	lap	5.600.000,00	
			00 3	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jaw a Timu r	Jumlah dokumen	6	dok	6.974.985.000 ,00	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jaw a Timu r	Jumlah dokumen	6	dok	6.974.985.000 ,00	
3	0 5	1 6		Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jaw a Timu r	Pelaksanaan Reviu	18	kali	767.550.000,0 0	Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Jaw a Timu r	Pelaksanaan Reviu	18	kali	767.550.000,0 0	
			00 1	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jaw a Timu r	Jumlah laporan reviu	5	lap	339.950.000,0 0	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jaw a Timu r	Jumlah laporan reviu	5	lap	339.950.000,0 0	
			00 2	Reviu Laporan Keuangan	Jaw a Timu r	Jumlah laporan reviu	9	lap	356.100.000,0 0	Reviu Laporan Keuangan	Jaw a Timu r	Jumlah laporan reviu	9	lap	356.100.000,0 0	
			00 3	Reviu Pengadaan	Jaw a	Jumlah laporan reviu	4	lap	71.500.000,00	Reviu Pengadaan	Jaw a	Jumlah laporan reviu	4	lap	71.500.000,00	

No				Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catat an Penti ng
				Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
				Barang/ Jasa	Timu r					Barang/ Jasa	Timu r					
3	0 5	2 0		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jaw a Timu r	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	76	perse n	3.682.498.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jaw a Timu r	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	76	perse n	3.682.498.000	
			00 1	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jaw a Timu r	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	76	%	1.798.593.000	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jaw a Timu r	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	76	%	1.798.593.000	
					Jaw a Timu r	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	76	%			Jaw a Timu r	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	76	%		
					Jaw a Timu r	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri	76	%			Jaw a Timu r	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri	76	%		

No				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catat an Penti ng	
				Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp.000)
3	0 5	2 0	00 2	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jaw a Timu r	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	4	dok	1.883.905.000	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jaw a Timu r	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	4	dok	1.883.905.000	
TOTAL									32.579.753.00 0,00	TOTAL						32.579.753.00 0,00

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terkait pembahasan Anggaran Tahun 2020 bersama berbagai pemangku kepentingan, tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam forum Musrenbang tersebut. Selain hal tersebut, dalam forum Musrenbang yang dilakukan melalui media Website musrenbang juga tidak terdapat usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan program-program yang terdapat di Inspektorat ini dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan Kebijakan Nasional dari KPK dan juga peraturan dari pusat antara lain :

- a. Pelaksanaan Monev terhadap Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- b. Sapu Bersih Pungutan Liar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- c. Pelaksanaan Maturitas SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
- d. Survey Integritas dari KPK dan BPS untuk menilai tingkat integritas di Provinsi Jawa Timur. Survey dilakukan untuk memetakan resiko korupsi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2019-2020. Di samping itu, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2020. Target tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN						SA TU AN	FORMULASI
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1 Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi		Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur	76,2	76,3	76,4	76,5	76,6	76,7	-	-
	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2	80	81	82	83	84	85	-	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP 90 - 100 = AA 80 - 90 = A Nilai Opini BPK RI WTP = 100 WDP = 75 TMP = 50 Disclaimer = 25
	2 Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Rata-rata nilai maturitas SPIP pada OPD diperiksa	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	-	Total nilai maturitas SPIP pada OPD diperiksa/ Jumlah OPD diperiksa
	3 Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	4	4	4	-	Level kapabilitas APIP oleh BPKP

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain Terkait dengan visi Gubernur terpilih yaitu : Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, yang diterjemahkan ke dalam misi Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris sehingga untuk mencapai visi misi gubernur tersebut diperlukan beberapa kegiatan baru untuk mendukung pencapaian visi misi gubernur Jatim tersebut antara lain :

1. Adanya kegiatan dari KPK yang akan menilai tingkat integritas di Jawa Timur, sehingga Inspektorat menambahkan kegiatan Survey Penilaian Integritas.
2. Adanya program/ kegiatan dari KPK yang harus diakomodir antara lain terkait pungutan liar, sehingga diperlukan kegiatan tambahan yang dimasukkan antara lain kegiatan Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar
3. Adanya banyaknya pengaduan masyarakat kepada Inspektorat selaku APIP, sehingga dibutuhkan program/ kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum seperti Polri dan Kejari, sehingga diperlukan kegiatan tambahan yang dimasukkan antara lain Kerja Sama APIP-APH
4. Adanya banyak masalah dalam meng SPJ kan keuangan di desa, sehingga memunculkan ide untuk membuat program inovasi pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa.

Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain Inspektorat memiliki 6 program dan 24 kegiatan, dengan total pagu anggaran yang direncanakan pada tahun 2020 yaitu Rp. 32.579.753.000. Tabel rencana program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
3	5	1	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kerugian Daerah	Jawa Timur	50	persen	16.400.545.000	APBD		50	persen	16.737.080.000
			00 1	Pengawasan Reguler PD/UPT	Obyek Pemeriksaan	Jawa Timur	90	obyek	8.201.250.000,00	APBD		90	obyek	8.201.250.000,00
			00 2	Monev Pertanggungjawab an Pengelolaan Keuangan	Obyek Pemeriksaan	Jawa Timur	60	obyek	3.465.500.000	APBD		60	obyek	3.802.035.000
			00 3	Pemeriksaan tujuan tertentu/ Kasus/ Khusus	Obyek Pemeriksaan	Jawa Timur	45	obyek	1.593.220.000	APBD		45	obyek	1.593.220.000
			00 4	Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa	Jumlah Kab yang dilakukan klinik konsultasi	Jawa Timur	12	kab	1.891.700.000	APBD		12	kab	1.891.700.000
			00 5	Klinik Konsultasi pada Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dilakukan klinik konsultasi	Jawa Timur	20	PD	128.000.000	APBD		20	PD	128.000.000
			00 7	Evaluasi LPPD	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	Jawa Timur	38	Kab/ Kota	980.525.000	APBD		38	Kab/ Kota	980.525.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokas i	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
			00 8	evaluasi LAKIP	Jumlah PD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A	Jawa Timur	45	PD	140.350.000	APBD		45	PD	140.350.000
3	0 5	7 9		Program Pencegahan Korupsi	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi	Jawa Timur	10 0	persen	3.694.375.000	APBD		2 OP D		2.110.525.000
			00 1	Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Swasta	Rapat Kerja Anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	Jawa Timur	4	kali	126.500.000	APBD		4	kali	126.500.000
			00 2	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pencanangan pada PD/ satker	Jawa Timur	2	entitas	43.105.000	APBD		2	entitas	43.105.000
			00 3	Kerja Sama APIP- APH	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	Jawa Timur	2	kali	1.275.750.000	APBD		2	kali	1.275.750.000
					Rapat kerja pembahasan kasus/ pengaduan masyarakat	Jawa Timur	4	kali		APBD		4	kali	
			00 4	Peringatan Hari Anti Korupsi	Pelaksanaan Peringatan Hari Anti Korupsi	Jawa Timur	1	kali	257.950.000	APBD		1	kali	257.950.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokas i	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
			00 5	Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Jumlah evaluasi	Jawa Timur	4	kali	1.278.350.000	APBD		4	kali	1.278.350.000
			00 6	Survei Penilaian Integritas	Perangkat daerah yang disurvei	Jawa Timur	6	PD	123.150.000	APBD		6	PD	123.150.000
			00 7	Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi	Pelaksanaan monev rencana aksi pada perangkat daerah	Jawa Timur	8	PD	539.070.000	APBD		8	PD	539.070.000
					Pelaksanaan monev rencana aksi pada Kabupaten/ Kota	Jawa Timur	12	kab/ko ta		APBD		12	kab/kot a	
			00 8	Audit Berkala SNI ISO 37001:2016	Jumlah audit internal dan eksternal	Jawa Timur	2	kali	50.500.000	APBD		2	kali	50.500.000
3	5	2 1		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Diklat/ PKS	Jawa Timur	10 0	persen	986.820.000	APBD		100	persen	986.820.000
		2 1	00 1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/ pelatihan formal	Jawa Timur	10 0	pegaw ai	986.820.000	APBD		100	pegaw ai	986.820.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokas i	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
3	0	0		Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	Jawa Timur	77	%	7.047.965.000,00	APBD		79	%	7.047.965.000,00
					Persentase realisasi anggaran	Jawa Timur	90	%		APBD		90	%	
					Indeks profesionalitas ASN	Jawa Timur	77	%				79	%	
			00 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen	Jawa Timur	6	dok	67.380.000,00	APBD		6	dok	67.380.000,00
			00 2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan	Jawa Timur	14	lap	5.600.000,00	APBD		14	lap	5.600.000,00
			00 3	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen	Jawa Timur	6	dok	6.974.985.000,00	APBD		6	dok	6.974.985.000,00
3	0	1		Program Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Reviu	Jawa Timur	18	kali	767.550.000,00			18	kali	767.550.000,00
			00 1	Reviu Dokumen Perencanaan dan Panganggaran	Jumlah laporan reviu	Jawa Timur	5	lap	339.950.000,00			5	lap	339.950.000,00

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
						Lokas i	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
			00 2	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu	Jawa Timur	9	lap	356.100.000,00			9	lap	356.100.000,00
			00 3	Reviu Pengadaan Barang/ Jasa	Jumlah laporan reviu	Jawa Timur	4	lap	71.500.000,00			4	lap	71.500.000,00
3	0 5	2 0		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jawa Timur	76	persen	3.682.498.000	APBD		77	%	3.682.498.000
			00 1	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	Jawa Timur	76	%	1.798.593.000	APBD		77	%	1.798.593.000
					Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	Jawa Timur	76	%		APBD		77	%	
					Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri	Jawa Timur	76	%		APBD		77	%	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catata n Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
						Lokas i	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
3	0	2	00	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	Jawa Timur	4	dok	1.883.905.000	APBD		4	dok	1.883.905.000
				TOTAL					32.579.753.000,00		TOTAL			32.579.753.000,00

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, disusunlah arah kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Timur yaitu: [1] Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat; [2] Penguatan aksi anti-korupsi dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); [3] Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu; dan [4] Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Prioritas Provinsi Tahun 2019 yang juga terdiri dari 5 prioritas. Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang terkait langsung dengan prioritas provinsi ke-5 yaitu “PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA KESUKSESAN PELAKSANAAN PEMILU.” Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat mengajukan usulan kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan Reformasi Birokrasi yaitu “SABER PUNGLI DAN GRATIFIKASI” yang diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan antara lain Pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi; Verifikasi/ Reviu Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) di Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur; dan Identifikasi Potensi Pungutan Liar.

4.1. PRIORITAS INSPEKTORAT YANG MENDUKUNG PRIORITAS PROVINSI

4.2. PRIORITAS INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Di samping terkait langsung dengan prioritas provinsi, Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga mendukung isu strategis pembangunan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah. Permasalahan dalam kewenangan Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 dan 2018 yaitu banyaknya jumlah penyimpangan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, isu strategis yang dihadapi Inspektorat pada tahun 2019 adalah adanya potensi korupsi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hal ini terkait pula dengan Tahun Pemilu 2018 di mana berakhirnya masa jabatan beberapa kepala daerah di Jawa Timur juga menjadi fokus Inspektorat Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan selama 5 tahun jabatan kepala daerah terkait dengan melaksanakan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah. Selanjutnya untuk tahun 2020, Inspektorat berusaha menambah fokus prioritas pengawasan dan pembinaan pada pengelolaan bantuan keuangan di desa.

Sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, Inspektorat selaku perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan mendukung pada sisi prioritas penunjang khususnya terkait dengan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja yang dituangkan ke dalam program dengan nomenklatur yang sama. Di dalam program tersebut, terdapat 6 (Enam) kegiatan, namun yang menjadi prioritas Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Tahun 2020 ada 7 (tujuh) kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1. Prioritas Inspektorat Provinsi Jawa Timur

No	Kegiatan Prioritas PD	Target / Satuan	Lokasi	Program Numenklatur	Kegiatan Numenklatur	Keterangan Perangkat Daerah
1	Pengawasan ke Perangkat Daerah, Kab/Kota, dan Klinik Konsultasi ke Desa	12 kab	Jawa Timur	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Pemeriksaan Reguler PD/ UPT	
2	Pemeriksaan Khusus/ Kasus	45 obyek	Jawa Timur		pemeriksaan tujuan tertentu/ Kasus/ Khusus	
3	Klinik konsultasi bagi perangkat desa yang diberi nama "KADES LAWAS" yang merupakan akronim dari KAWAL DESA MELALUI PENGAWASAN, bekerja sama dengan PD Kabupaten		Jawa Timur		Klinik Konsultasi Bantuan Keuangan di Desa	
4	Survey Penilaian Integritas	6 PD	Jawa Timur	Program Pencegahan Korupsi	Survey Penilaian Integritas	
5	Saber Pungli	4 kali	Jawa Timur	Program Pencegahan Korupsi	Identifikasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	

4.3.INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

Berikut ini disajikan data terkait Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang menjelaskan tentang indikator kinerja Pembangunan Daerah dan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

Tabel 4. 2. Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2020
1	Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi		Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur	76,3
2		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Rata-rata nilai maturitas SPIP pada OPD diperiksa	3,2
3		Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Total Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK RI dibagi 2	81



BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Penyusunan Program dan anggaran Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Kami menyadari di dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini dapat menjadikan acuan kerja kami selama 1 tahun ke depan, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Sidoarjo,

2019

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. HELMY PERDANA PUTERA, Drs., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630325 198903 1 013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
INSPEKTORAT